

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

India merupakan sebuah negara demokrasi di Asia Selatan. India mempunyai penduduk terbanyak kedua di dunia, yang memiliki populasi 1,353 miliar. India juga negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis mencakup area seluas 32,87.263 km persegi, membentang dari ketinggian Himalaya yang tertutup salju hingga hujan tropis di selatan (KBRI di New Delhi, n.d.). Ekonomi India adalah terbesar keempat di dunia dalam Produk Nasional Bruto (PDB), diukur dari segi paritas daya beli/*Purchasing Power Parity* (PPP), dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Dalam sistem politik India memakai model liberal demokrasi, Inggris yang pernah menjajah India sehingga India menerapkan dan mempraktekan nilai konstitusi Inggris. India mempraktekan politik yang dinamis dari doktrin Gujral dan berusaha menjalani hubungan dengan negara-negara tetangganya.

Kebijakan luar negeri India sangatlah besar, ada beberapa faktor yang dapat di lihat untuk mengenal kebijakan luar negeri India, faktor pertama wilayah India sangat strategis yaitu diantara Asia Tengah, Asia Selatan dan menghubungkan Asia Timur dan Asia barat, faktor kedua adalah India memiliki keinginan untuk lebih mengembangkan pertumbuhan perekonomian India melalui kebijakan luar negeri, faktor ketiga adalah India ingin berkembang melebihi negara-negara di Asia dan adanya pergeseran visi India dalam melihat politik

luar negeri (Agasha, 2018). India sebagai negara yang besar memiliki kekuatan militer yang mampu untuk menjaga stabilitas internal maupun eksternal negaranya. India sebagai salah satu pemimpin di kawasan Asia Selatan memiliki peran sebagai penstabil kekuasaan dan perkembangannya. India melakukan teknologi *sharing and co-production* dengan Amerika Serikat untuk menjaga keamanan di negara-negara tetangganya termasuk Maladewa (Wulandari, 2017).

Maladewa merupakan negara dengan dinamika politik internasional yang tidak cukup terlihat popularitasnya. Hal tersebut disebabkan geopolitik negara ini berada di tengah Samudra Hindia dan tidak terhubung secara langsung dengan negara lain. Dalam keadaan itu, pemerintah Maladewa tetap dituntut untuk menjamin perdamaian dan stabilitas nasional sehingga dapat dinikmati rakyatnya (The Government of Maldives, 2001). Secara politik, Maladewa tidak menonjol karena orientasi politik luar negerinya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jalannya hubungan internasional pada level global.

Maladewa pernah menjadi negara yang memiliki sistem monarki (kesultanan) dan kemudian pernah bertransformasi menjadi republik hingga saat ini. Maladewa juga menganut konsep *trias politika* dalam perimbangan kekuasaan. Majelis of Maldives disebut sebagai lembaga legislatif dengan 85 anggota dewan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum lima tahun sekali. Dalam bidang eksekutif, sistem politik pemerintahan Maladewa secara aplikatif menekankan pada sistem

presidensial yang memberikan kewenangan cukup besar kepada presiden untuk memimpin kabinet guna mendukung efektivitas pemerintahan Maladewa. Kemudian pada bidang yudikatif, terdapat Maldives Court of Justice yang menjalankan hukum-hukum berdasarkan pada konsep syariah (Nuuri, 2019).

Krisis politik dimulai pada tanggal 1 Februari 2018, ketika Mahkamah Agung secara mengejutkan memerintahkan pembebasan sembilan tahanan politik termasuk Nasheed, mantan Presiden Maladewa, yang memutuskan bahwa persidangan mereka bermotif politik. Pengadilan juga memulihkan 12 anggota parlemen yang secara kontroversial dikeluarkan dari parlemen pada Juli 2017 karena membelot dari partai Yameen. Namun, pemerintah menolak untuk menerapkan keputusan Mahkamah Agung (Benedict & Rasheed, 2018). Pada tanggal 5 Februari, Presiden Yameen mengumumkan keadaan darurat selama 15 hari. Hakim Mahkamah Agung Abdulla Saeed dan Ali Hameed ditangkap bersama mantan Presiden Maumoon Abdul Gayoom, saudara tiri Yameen. Mereka ditangkap karena tuduhan terorisme dan menghalangi keadilan. Tiga hakim Mahkamah Agung yang tersisa mengembalikan keyakinan para pemimpin oposisi. Puluhan tokoh dan aktivis oposisi ditahan selama keadaan darurat (Human Rights Watch, 2019).

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra'ad Al Hussein, menyatakan deklarasi keadaan darurat dan menyuarakan keprihatinan bahwa penanggulangan jaminan konstitusional yang dihasilkan berpotensi

menyebabkan lebih banyak pelanggaran hak-hak masyarakat di Maladewa. Dia berkata:

“Maladewa telah menyaksikan dalam beberapa tahun terakhir serangan terhadap lawan politik, jurnalis, masyarakat sipil, dan pembela hak asasi manusia, dan apa yang terjadi sekarang sama seperti serangan habis-habisan terhadap demokrasi. Saya sangat prihatin bahwa tindakan yang diambil tampaknya melampaui yang diizinkan selama keadaan darurat, membatasi prinsip-prinsip dasar demokrasi, dan merongrong penghormatan terhadap hak-hak fundamental di negara ini (Benedict & Rasheed, 2018).”

Keadaan darurat diperpanjang selama 30 hari pada 20 Februari 2018 karena Presiden Yameen beralasan keamanan nasional dan krisis konstitusional sedang terancam. Mahkamah Agung memberikan respon bahwa tindakan tersebut tidak konstitusional karena pemungutan suara untuk memperpanjang keadaan darurat dipaksa melalui perlemen tanpa forum. Sementara keadaan darurat dicabut pada 22 Maret 2018, penangkapan kritikus pemerintah pun terus berlanjut (Benedict & Rasheed, 2018). Para pemimpin oposisi Maladewa, seperti mantan Presiden Mohamed Nasheed, mendesak India untuk campur tangan dalam memulihkan demokrasi Maladewa.

Namun, kekhawatiran terbesar India bukanlah ancaman dari demokrasi, tetapi ketakutannya dengan China. China kemungkinan mendirikan pangkalan angkatan laut dan udara di Maladewa. Pangkalan China di Maladewa mungkin mengganggu keseimbangan angkatan laut di seluruh Samudra Hindia dan berpotensi mengancam daratan India (Brewster, *As Maldives Burns, Lessons for China and India's Limited Options*, 2018).

Pengaruh ekonomi China yang meningkat memicu ketakutan bagi negara India. Nepal, Maladewa, Sri Lanka, dan bahkan Bangladesh berada dalam cengkeraman China. Bagi India, penting untuk mengambil tindakan agar kepentingannya tetap utuh di Asia Selatan. Krisis tahun 2018 di Maladewa merupakan kesempatan bagi India untuk mendapatkan kembali pengaruhnya yang hilang di negara tersebut. Politik Maladewa yang bergejolak terus-menerus setelah pemilihan umum demokratis pertama pada tahun 2009 dan penggulingan mantan Presiden Mohammed Nasheed dalam kudeta pada tahun 2012 menjadi menunjukkan keterlibatan intensif penting India (Sharma, 2018). Oleh karena itu, kasus ini penting untuk diteliti guna mengetahui peran India dalam penyelesaian krisis politik Maladewa tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah apa saja upaya India dalam penyelesaian kasus krisis politik Maladewa tahun 2018?

1.3 Kerangka Pemikiran

1. Kepentingan Nasional

Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional merupakan hal yang paling mendasar untuk mendukung politik luar negeri dan politik internasional suatu negara (Yulianda, 2019). Konsep kepentingan nasional menjadi dasar bagi perilaku suatu negara dalam menjalankan kebijakan luar negerinya (Mas'oed, 1990). Perumusan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh keadaan dunia internasional dan politik dalam negeri. Setiap negara merumuskan berdasarkan kepentingan nasionalnya dan selalu bekerja dalam mengamankan tujuannya (Suwarman, et al., 2018). Dalam kebijakan luar negeri, negara juga harus waspada terhadap adanya campur tangan asing dalam kepentingannya. Dalam hal ini, dapat dijelaskan bahwa selain dipengaruhi keadaan politik dalam negeri, sistem pemerintahan suatu negara memengaruhi kepentingan nasional negara-negara sekaligus menentukan sikap dan kebijakan luar negeri (Maksum, 2015).

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional diartikan sebagai kepentingan vital suatu bangsa yang harus diperjuangkan demi kelangsungan hidup bernegara (Plano & Olton, 1982). Ketika kepentingan negara harmonis, negara sering bertindak bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan, ketegangan, persaingan, ketakutan, dan bahkan sampai perang.

Kepentingan vital suatu bangsa yang harus diperjuangkan menurut Jack C. Plano adalah:

1. *Independence* (Kemandirian), sebagai negara yang berdaulat atau merdeka, suatu negara harus terbebas dari ancaman dari luar maupun dalam negeri.
2. *Self-Preservation* (Mempertahankan Diri), suatu negara akan mempertahankan diri dari segala ancaman untuk kepentingan dalam negerinya.
3. *Teoritorial Integrity* (Keutuhan Wilayah), suatu negara harus mempertahankan kedaulatannya, keutuhan wilayahnya, dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mempertahankannya.
4. *Military Security* (Keamanan Militer), suatu negara akan menunjukan bahwa kekuatan militer mereka adalah kekuatan militer yang sangat kuat agar tidak ada negara lain yang mengganggu kepentingan nasional mereka.
5. *Economic Well Being* (Kemakmuran Ekonomi), kemakmuran ekonomi adalah suatu hal mendasar dan penting yang harus dijaga oleh suatu negara.

Berdasarkan lima kepentingan vital tersebut, menurut penulis ada tiga kepentingan vital yang dilakukan oleh India dalam krisis ini. Kepentingan pertama yang coba dilindungi oleh India adalah kepentingan terkait aspek *Self-Preservation*, India harus terlihat kuat di depan musuh. Cara India dalam mempertahankan diri adalah dengan menguasai Maladewa dan menjaganya dari ancaman China melalui kekuatan militer. India sudah melakukan perjanjian pertahanan diri dengan Maladewa, salah satunya India melakukan penjagaan keamanan di Maladewa melalui sebuah bantuan kapal cepat 260

ton yang canggih untuk membantu perairan pesisir (Poplin, 2014).

Kepentingan kedua yang coba dilindungi India adalah *Teoritorial Integrity*, India harus mempertahankan wilayah Maladewa yang sudah menjadi sekutu dari India. India sudah banyak melakukan hubungan bilateral terhadap Maladewa, seperti hubungan militer, hubungan komersial, dan hubungan ekonomi. India juga sudah banyak melakukan bantuan terhadap Maladewa. Semakin besar kekuatan penjagaan keutuhan wilayah suatu negara, maka akan semakin kuat pula kekuatan mereka untuk mempertahankan kepentingan nasional mereka dari segala ancaman yang datang dari negara ataupun aktor lainnya.

Kepentingan ketiga yang coba dilindungi India adalah *Military-Security*. Dalam bidang militer, India ingin mempertahankan aset militer mereka di Maladewa yang berupa pangkalan militer, seperti yang diketahui bahwa pangkalan militer India di Maladewa adalah satu-satunya pangkalan militer terdekat yang berada di kawasan Asia Selatan. Sedangkan dalam hal pertahanan, India ingin mengantisipasi intervensi negara lain di Maladewa

Menurut konsep kepentingan Nasional di atas, Jack C. Plano menjelaskan bahwa terdapat lima hal vital yang harus dipenuhi sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasional mereka. Dari lima hal tersebut, terdapat tiga hal yang menjadi kepentingan vital India dalam melakukan intervensi krisis politik yang sedang terjadi di Maladewa, tiga hal tersebut adalah *Self Preservation*, *Teoritorial Integrity*, dan *Military Security*.

2. Spheres of Influence

Sphere of Influence didefinisikan sebagai suatu bangsa (*influencer*) yang memiliki kekuasaan lebih tinggi serta pengaruhnya dengan negara-negara lebih rendah (Etzioni, 2015). *Sphere of Influence* di dalam hubungan internasional adalah sebuah negara yang mengontrol sebuah daerah asing. Konsep ini di mulai pada akhir abad ke 19 dimana para negara-negara *Great Powers* memiliki kekuasaan terhadap negara-negara di wilayah pengaruhnya. *Sphere of Influence* pada umumnya berkaitan dengan geopolitik yang dimana sebagai motivasi politik dan alat untuk mencapai kekuatan. Namun *Sphere of Influence* memiliki batas ruang lingkup, ketika suatu negara lain mengintervensi *Sphere of Influence* suatu negara, maka kedua negara akan terjadi konflik (Jansen, 2017). Dalam rivalitas India-China, Asia Selatan menjadi konflik antara India dan China dalam memperebutkan hegemoni di kawasan Asia Selatan.

Menurut Jack C. Plano bahwa *Influence* (pengaruh) sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah aktor. Jack C. Plano juga menjelaskan dimana wilayah didominasi dengan kepentingan nasional dari sesuatu kekuatan tertentu. Sebuah aktor besar mampu memaksa pihak lain untuk menerima sebuah ketaatan tingkah laku politik sesuai dengan kepentingan negara besar tersebut (Nurdiana, 2019).

Pergesekan antara *Sphere of Influence* bisa menyebabkan terjadinya konflik suatu negara. Menurut Holsti, pergesekan *Sphere of Influence* suatu negara dapat memberikannya hak istimewa dengan mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu

negara yang bukan kedaulatannya. China yang membawa kebijakan Satu Sabuk Satu Jalan (*One Belt One Road*) untuk memenangkan pengaruhnya di Maladewa. Sedangkan India, berambisi menjadikan Maladewa sebagai tempat pertahanan, sekaligus membendung upaya China untuk memperkuat domiasi di Samudra Hindia.

1.4 Hipotesa

Hipotesa penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi aspek *Self-Preservation* kepentingan nasionalnya, India memberikan bantuan militer kepada Maladewa.
2. Untuk memenuhi aspek *Territorial Integrity* kepentingan nasionalnya, India ikut campur dalam urusan politik dalam negeri Maladewa.
3. Untuk memenuhi aspek *Military-Security* kepentingan nasionalnya, India melakukan kerja sama militer dengan Maladewa di bawah payung IMMA India-Maladewa Military Agreement.

1.5 Metode Penelitian

1. Metodologi Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Untuk itu, penulis berusaha untuk menggambarkan upaya India dalam menyelesaikan krisis politik di Maladewa tahun 2018.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data menerapkan teknik studi pustaka (*Library Research*) dengan cara

mencari informasi dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yakni melalui buku, jurnal, beberapa dari laporan resmi institusi ternama, dan artikel website (Yulianda, 2019).

3. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan analisa kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Dalam hal ini, penulis berfokus terhadap upaya India dalam penyelesaian kasus krisis politik Maladewa tahun 2018, dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari media dan literasi yang dapat menjelaskan kasus tersebut.

1.6 Jangkauan Penelitian

Dalam melakukan analisis terhadap permasalahan ini, penulis melakukan pembatasan penelitian sampai di tahun 2018.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang berisi tentang dinamika hubungan bilateral India dengan Maladewa berdasarkan politik luar negeri India yang dapat menyaingi China di Asia Selatan.

Bab III menyajikan bab yang berisi tentang upaya India dalam penyelesaian krisis politik di Maladewa tahun 2018 yang mana mendapatkan halangan dari pihak oposisi dengan dukungan China.

Bab IV merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan bab.

